

EKSPOSIE

JURNAL JILIDING EKSPERIMENTAL DAN TEORI

MEDIA BERBAHASA DASAR KENDALIK KIRI PEJABATAN PADA MASYARAKAT



PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
P3M STAIN WATAMPONE

EMAIL: PUSAT.PENELITIAN.DAN.PENGABDIAN@STAIN-WA.CID.ac.id

EKSPOSE

Jurnal Hukum dan Pendidikan

Media Informasi dan Komunikasi Pengabdian pada Masyarakat

Edisi : Vol. XXII Periode Januari – Juni 2013

PENANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. H. Syarifuddin Latif, M.HI

REDAKTUR

Drs. Husaini, M.Si

Drs. Sulaiman Rafi

PENYUNTING/ EDITOR

Prof. Dr. H. Haddise, M.Ag

Dr. A. Nuzul, SH.,M.Hum

Abd. Rasyid R., S.Pd.,M.Pd

DESAIN GRAFIK

Syafruddin, S.Ag

Khaeruddin Kiramang, S.Ag.,SS.,MIM

Wahyudi Hasyim, A.Md.

DESAIN GRAFIK

Wahyudi Hasyim, A. Md

SEKRETARIAT

Husain Rafi, S.Sos.,M.Si

Dra. Hj. St. Bunatang, M.Si

Ismail Keri, S.Ag

Abd. Hafid, S.Ag.,M.Si

A. Ashrullah, S.HI

Zakia, S.Pd

PENERBIT

Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M)

STAIN Watampone

ALAMAT REDAKSI

Kantor P3M STAIN Watampone

Jl. Hos. Cokroaminoto Watampone, Telp. 0481-21395 Fax. 0481-23928

Redaksi mengundang para pakar, sarjana muslim untuk menulis secara bebas dan kreatif sambil berkomunikasi dengan masyarakat luas. Redaksi berhak mengedit naskah yang masuk tanpa merubah maksud dan isinya.

EKSPOSE
Jurnal Hukum dan Pendidikan

DAFTAR ISI

EKSISTENSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN PERMASALAHAN HUKUM KONTEMPORER H. Haddise.....	1- 12
PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PADA MADRASAH DI KOTA WATAMPONE H. Abdullah K.....	13-33
PROBLEMATIKA KOMPETENSI PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA PERADILAN AGAMA DAN SOLUSINYA Abdulhanna.....	34-48
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN BONE <i>(Studi Terhadap Usaha Kecil Pada Wisata Kuliner "Pantai Kering" Kota Watampone)</i> Abd. Rasyid R.....	49-63
PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) WATAMPONE Syamsuriadi.....	64-79
EFEKTIVITAS <i>STUCTURED LEARNING APROACH</i> (SLA) DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN <i>PEER HELPING</i> SISWA SMP Sintihian Susan/ Syahril.....	80-93
RAGAM BAHASA BAKU DALAM BAHASA INDONESIA Nirwana Rasyid.....	94-105
PANDANGAN ISLAM TERBADAP KAFATIAH DALAM PERKAWINAN Syamsidar.....	106-117
STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DALAM PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN & LINGKUNGAN HIDUP (PKLH) DI MADRASAH Surtani Nur.....	118-135
REFORMULASI METODOLOGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB MELALUI DESAIN PENDEKATAN METODE <i>SILENT WAY</i>/GURU DIAM (<i>Upaya Peningkatan Kualitas Mahasiswa</i>) Maria Ulfah Syarif.....	136-148

PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH PADA MADRASAH DI KOTA WATAMPONE

(Oleh : H. Abdullah, K.

ABSTRAK

Implementation of school-based management is based on part of the implementation of the decentralization of education in Indonesia. The three main variables in this research the performance of principals, teachers and community participation and performance is a patron of the successful implementation of MBS, therefore the purpose of research is being carried out to see the extent to which the performance of principals, teachers, and community participation in the implementation of MBS.

These studies include the type of survey research, to the nine schools selected for the study sample with the consideration that in the early stages of implementation of the MBS is possible to come to fruition due to various factors that have such support, teacher resources, facilities, infrastructure and adequate school infrastructure inadequate.

The results of three main elements indicate, first, that the implementation of school-based management be seen from the performance of the principal tasks and functions such as a manager, administrator, supervisor, leader, innovator and motivator can run quite well. Second, that assessed the performance of teachers through such aspects as completeness of the teaching program, presentation of subject matter, evaluation and analysis of student learning outcomes as well as the improvement and enrichment program running smoothly. Third, that public participation is fully demonstrated good cooperation with the school management. This happens because of high academic ability of the organization (school committee) to actively participate in planning activities, program monitoring and evaluation of the school.

Kata Kunci : Manajemen Berbasis Sekolah, Madrasah

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Sistem pendidikan yang mengakomodasi seluruh elemen yang esensial diharapkan muncul dari pemerintah Kabupaten dan Kota sebagai wewenang penerima otonomi daerah.

Orientasi pendidikan suatu bangsa menunjukkan bagaimana praktek pendidikan berlangsung, dan pada tahap berikutnya akan dapat dijadikan dasar untuk memramalkan kualitas lulusan yang ditelorkan oleh

praktek pendidikan tersebut. Setiap orientasi pendidikan dapat dikaji berdasarkan empat dimensi yang ada, yakni dimensi status anak didik, dimensi peran guru, dimensi materi pengajaran dan dimensi manajemen pendidikan.

Orientasi pendidikan kita cenderung memperlakukan peserta didik berstatus sebagai obyek atau klien, guru berfungsi sebagai pemegang otoritas tertinggi keilmuan dan indokrinator, materi bersifat *subject oriented* manajemen bersifat sentralistik. Orientasi pendidikan yang kita gunakan tersebut menyebabkan praktek pendidikan kita mengisolir diri dari kehidupan yang riil yang ada di luar sekolah kurang relevan antara apa yang diajarkan dengan kebutuhan dalam pekerjaan, terlalu terkonsentrasi pada pengembangan intelektual yang tidak berjalan dengan pengembangan individu sebagai satu kesatuan yang utuh dan berkepribadian. Proses belajar mengajar didominasi dengan tuntutan untuk menghafalkan dan menguasai pelajaran sebanyak mungkin untuk menghadapi ujian atau tes, dimana pada kesempatan tersebut anak didik harus mengeluarkan apa yang telah dihafalkan.

Akibat dari praktek pendidikan semacam ini muncullah berbagai kesenjangan yang antara lain berupa kesenjangan akademik, kesenjangan okupasional dan kesenjangan kultur, kesenjangan akademik menunjukkan bahwa ilmu yang dipelajari di sekolah tidak ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Reformasi yang dilakukan harus mencakup tiga aspek dalam pendidikan: aspek organisasi dan kultur sekolah/madrasah, aspek pekerjaan guru, dan aspek interaksi sekolah/madrasah dan masyarakat.

Reformasi pendidikan diarahkan untuk merubah organisasi dan kultur sekolah/madrasah, pekerjaan guru dan keterkaitan sekolah/madrasah dan masyarakat dengan tujuan untuk mengembangkan komitmen dan kemampuan guru dan siswa guna mencapai prestasi setinggi mungkin untuk semua peserta didik tanpa memandang latar belakang mereka.

Strategi yang dikembangkan dalam proses reformasi menurut Zamroni adalah *Pertama*, karena luasnya cakupan pendidikan, *kedua*, reformasi pendidikan memerlukan kesadaran akan berbagai kemungkinan yang timbul dari kebijakan reformasi tersebut, *ketiga*, pendekatan yang diperlukan adalah pendekatan produk bukan pendekatan proses, *keempat*, di masing-masing sekolah(madrasah) diminta untuk mengembangkan garis kendali mutu yang secara terus menerus mencari model-model dan teknik-

teknik yang paling efisien dan produktif dalam kegiatan proses belajar mengajar.¹

Kebijakan yang sudah ada sekarang ini, terkait dan sepadan (*link and match*) dengan pengorganisasian muatan lokal, masih belum tuntas dilaksanakan. Sekarang diharapkan pula pada otonomi daerah yang menuntut pengelolaan pendidikan secara otonom dengan model manajemen berbasis sekolah atau *school based management* (SBM). Kondisi tersebut menuntut pemikiran-pemikiran yang sistematis untuk merumuskan bentuk hubungan kerja yang sesuai dalam kaitannya dengan otonomi daerah dan relevansi pendidikan.

Dari berbagai problema dan tantangan yang menyertainya, baik secara konseptual maupun secara operasional pelaksanaan model manajemen berbasis sekolah, maka urgensi penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji lebih mendalam pada tingkat aktualisasi realitasnya yang lebih riil.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Sejahterama pelaksanaan manajemen berbasis sekolah pada Madrasah di Kota Watampone dilihat dari aspek kinerja Kepala Madrasah?
- b. Sejahterama pelaksanaan manajemen berbasis sekolah pada Madrasah di Kota Watampone dilihat dari aspek kinerja guru?
- c. Sejahterama pelaksanaan manajemen berbasis sekolah pada Madrasah di Kota Watampone dilihat dari aspek kinerja peran serta masyarakat?

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kinerja Kepala Madrasah sehubungan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah pada Madrasah di Kota Watampone.
- b. Untuk mengetahui kinerja guru dalam proses belajar mengajar pada Madrasah di Kota Watampone.
- c. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat pada Madrasah di Kota Watampone.

TINJAUAN PUSTAKA

Desentralisasi Pendidikan

Menurut Burhanuddin, sistem sentralisasi atau desentralisasi dalam penyelenggaraan atau manajemen pemerintahan memiliki implikasi

¹ Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan* (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000), h.

langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan, sistem pendidikan nasional dan manajemen pendidikan. Bidang-bidang yang terkait langsung dengan sistem itu adalah kebijakan, pengawasan, mutu dan sumber dana pendidikan.²

Selubungan dengan itu Sidi mengemukakan empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu direkonstruksi dalam rangka otonomi daerah, berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan sebagai berikut:

- a. Upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melalui consensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat.
- b. Peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah.
- c. Peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat.
- d. Pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan.³

Sedangkan urusan-urusan yang dilimpahkan ke daerah, berpedoman pada standar nasional yang disusun oleh pusat, sebagai berikut:

- a. Rekrutmen dan seleksi calon guru yang akan diangkat sebagai PNS.
- b. Rekrutmen dan peningkatan calon guru untuk memenuhi kebutuhan khusus, yang anggarannya menjadi beban daerah atau proyek-proyek khusus yang dibayai pusat.
- c. Pencampuran dan mutasi guru dalam lingkup daerah yang bersangkutan.
- d. Penilaian kinerja guru dalam kenaikan pangkat, promosi jabatan dan pemberian tunjangan atas dasar prestasinya.
- e. Penempatan jumlah dan pemberian tunjangan daerah sesuai dengan kemampuan daerah yang bersangkutan (ditang gaji/tunjangan sebagai PNS).
- f. Pembinaan mutu guru/pamong belajar melalui pelatihan/penataran dan wahana-wahana lainnya.

Implikasi desentralisasi manajemen pendidikan adalah kewenangan yang lebih besar diberikan kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya, perubahan kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan

² Burhanuddin, *Desentralisasi Manajemen Pendidikan* (Malang: UNM, 1998), h.

³ Djati Sidi Indra, *Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan* (Bandung: PPS UPI, 2000), h.

efisiensi serta efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pada unit-unit kerja di daerah, kepegawaian menyangkut perubahan dan pemberdayaan sumber daya manusia dan menekankan pada profesionalisme, serta perubahan-perubahan anggaran pembangunan pendidikan (DIP) yang dikelola langsung oleh BKPN (Bappenas) ke kabupaten dalam bentuk Blok Grand sehingga menghilangkan ketekutan dan pengotakan dalam penanganan anggaran (BPPN dan Bank Dunia, 1991).

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan di atas bahwa pergeseran sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kewenangan lebih banyak kepada daerah kabupaten dan kota pada dasarnya memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pemangkasan mekanisme sistem birokrasi yang berbelit-belit yang terpusat secara sentralistik lebih banyak membuang biaya dan waktu sampai tiba pada tahap sasaran pendidikan yang sesungguhnya seperti perbaikan kualitas personil pendidikan sekolah/madrasah dan peserta didik di daerah.

Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan merupakan alternatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil penelitian Balitbangdikbud (1991) menunjukkan bahwa manajemen sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan.

Selanjutnya Gaffar (1989), mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematis, sistemik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Mugatroyd dan Morgan dalam Mantja (2002), mengemukakan empat gagasan dasar yang sangat sentral bagi keefektifan manajemen perskolahan. *Pertama*, bahwa lembaga pendidikan merupakan mata rantai yang menghubungkan pelanggan (*customer client*) dan pemasok (*supplier*). *Kedua*, yang merupakan gagasan kunci ialah semua hubungan antara pelanggan dan pemasok ditengahi oleh proses. *Ketiga*, orang yang paling dapat melakukan perbaikan adalah mereka yang dekat dengan pelanggan dalam proses tersebut. *Keempat*, untuk menjamin terdapatnya dukungan perbaikan performansi kualitas terhadap sekolah dipertyaratkan kepemimpinan.

yang bervisi, yang mendukung dan meningkatkan kinerja terhadap mereka yang dekat (familiar) dengan klien.⁴

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah

Tujuan manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah meningkatkan efisiensi mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui koleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelola sekolah/madrasah peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif.

Hal yang penting dalam implementasi/pelaksanaan manajemen berbasis sekolah adalah manajemen terhadap komponen-komponen sekolah/madrasah itu sendiri. Menurut Mulyasa, sedikitnya terdapat tujuh komponen-komponen sekolah (madrasah) yang harus dikelola dengan baik dalam rangka pelaksanaan MBS, yaitu kurikulum dan program pengajaran, tenaga kependidikan, kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan hubungan sekolah (madrasah) dan masyarakat serta manajemen layanan khusus lembaga pendidikan.⁵

Kinerja Kepala Sekolah

Kepala sekolah/madrasah sebagai seorang manajer yang ditempatkan dalam suatu organisasi disamping harus memiliki bobot pengetahuan, pengalaman dan keterampilan, harus pula memiliki perspektif dan objektivitas.

Kepala sekolah/madrasah sebagai supervisor pengajaran di sekolahnya/madrasah, karena dialah yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi semua program pengajaran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kepala sekolah/madrasah harus memiliki kompetensi yang mengacu pada perbuatan dan kinerja yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu.⁶

⁴ Mantja, W. dan Ali Imron. *Manajemen Peserta Didik* (Malang: Depdikbud), h.

⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi dan Implementasi)* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h.

⁶ Tisna Amidjadja, D.A., *Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia dari Pedoman Pelaksanaannya* (Jakarta: Depdikbud, 1981), h.

Kinerja Guru Dalam Proses Belajar Mengajar

Pemahaman akan hakikat kerja guru sangat penting sebagai landasan dalam program pembinaan dan mengembangkan guru, selubungannya dengan itu Zamroni mengemukakan karakteristik kerja guru, antara lain:

- a. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang bersifat *individualistic non kolaboratif*.
- b. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang dilakukan dalam ruang yang terisolir dan menyerap seluruh waktu.
- c. Pekerjaan guru adalah pekerjaan yang kemungkinan terjadinya kontak akademis antar guru rendah.
- d. Pekelas, kerjaan guru tidak pernah mendapat umpan balik.
- e. Pekerjaan guru memerlukan waktu untuk mendukung waktu kerja di ruang kelas.⁷

Selain dari karakteristik kerja guru di atas dalam memberikan pemahaman tentang pekerjaan guru ada tiga kegiatan penting yang diperlukan oleh guru dilihat dari aspek mentalitas dan vitalitas untuk bisa meningkatkan kualitasnya. *Pertama*, para guru harus memperbanyak tukar pikiran tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman mengembangkan materi pelajaran dan berinteraksi dengan peserta didik. *Kedua*, akan lebih banyak kalau apa yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan ilmiah yang dihadiri para guru adalah merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh para guru sendiri. *Ketiga*, guru harus membiasakan diri untuk mengkomunikasikan hasil penelitian yang dilakukan, khususnya lewat media cetak.

Partisipasi Masyarakat

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Selanjutnya, peran serta masyarakat dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (Diknas, 2001), yang diharapkan dari masyarakat antara lain tenaga, dana dan pemikiran.

Demikian juga dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagian Ketiga Pasal 8 dan 9 mengenai Hak dan Kewajiban Masyarakat ditegaskan bahwa:

- a. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

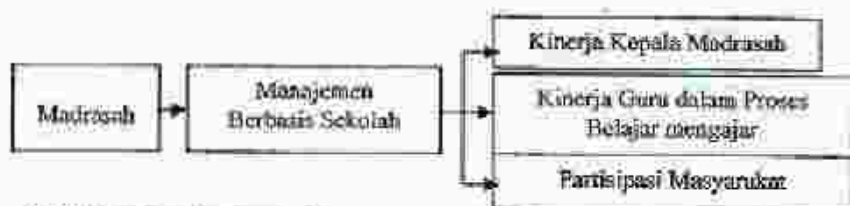
⁷ Zamroni, *op.cit.*, h.

- b. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (Silaban, 2003).

Partisipasi masyarakat merupakan wujud pemberdayaan masyarakat sebagai daya dukung (*stakeholder*) madrasah dalam rangka pengelolaan madrasah secara efektif dan efisien agar se-optimal mungkin sasaran dan tujuan pendidikan madrasah dapat tercapai.

Kerangka Pikir

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang arah penelitian ini secara skematis digambarkan kerangka berpikir penelitian dapat dilihat pada bagan berikut:



METODE PENELITIAN

Jenis Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian *survey* yang berupaya mencari informasi dan fakta terhadap obyek yang diteliti, selanjutnya mendeskripsikan dan mengungkapkan kecenderungan masing-masing variabel penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Watampone pada tiga kecamatan yaitu kecamatan Tanete Riattang, Kec. Tanete Riattang Timur dan Kec. Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone secara purposive yaitu memilih Madrasah (MI, MTs dan MA).

Variabel Dan Defenisi Operasional

Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel yang akan dianalisis dalam rangka pelaksanaan manajemen berbasis sekolah; (a) kinerja kepala sekolah, (b) kinerja guru dalam proses belajar mengajar, (c) partisipasi masyarakat.

a. Defenisi Operasional.

- 1) Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah adalah pengelolaan madrasah secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan pendidikan madrasah.

- 2) Kinerja kepala madrasah yaitu kemampuan melaksanakan fungsi dan tugas jabatan kepala madrasah.
- 3) Kinerja guru adalah kemampuan guru melaksanakan kegiatan dalam proses belajar mengajar.
- 4) Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan madrasah.

Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua madrasah di Kota Watampone dengan sampel penelitian dipilih secara sengaja tiga madrasah yaitu Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

Jumlah madrasah di kota Watampone sebanyak 16 buah lalu dijadikan sampel 9 madrasah diantaranya, yang dipilih secara berjenjang yaitu 3 madrasah Aliyah (MAN 1, MAN II, MAS Ma'had), 3 Madrasah Tsanawiyah (MTs Watampoe, MTs An-Nurain Lonrae, MTs Ma'had Biru) demikian juga 3 madrasah Ibtidayah (MIS Macunang, MIS Pso Bajoo, MIS Darul Hikmah). Dari masing-masing madrasah ditetapkan Kepala, Guru dan Komite Sekolah sebagai responden/informan.

Teknik Dan Prosedur Pengumpulan Data

- a. Kuesioner
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang diperoleh lewat angket terhadap sejumlah responden untuk mengetahui sikap dan pandangannya mengenai permasalahan yang diteliti, selanjutnya, data yang telah diolah disusun dalam bentuk klasifikasi disesuaikan dengan jenis variabelnya. Kemudian dilakukan analisis secara deskriptif terhadap setiap variabel, sebagaimana tertera pada desain penelitian dan instrumen penelitian dengan menggunakan parameter (*rating scale*), sangat tinggi, tinggi dan rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Gambaran Umum Madrasah di Kota Watampone

a. Keadaan Guru

Jumlah guru sebanyak 270 orang dengan tugas mengajar pada 9 madrasah (Ibtidayah, Tsanawiyah, Aliyah) negeri atau swasta lebih banyak

berada pada golongan tiga yaitu sebanyak 226 orang guru dan golongan empat sebanyak 36 orang dan paling sedikit yang berada pada golongan dua yaitu sebanyak 8 orang.

b. Keadaan Murid

Keadaan murid madrasah di kota Watampone pada tahun 2005 adalah sejumlah 3.036 orang sesuai data yang dihimpun dari sembilan Madrasah. Perimbangan jumlah laki-laki dengan perempuan tidak memperlihatkan perbedaan yang menjolok yakni jumlah murid laki-laki sebanyak 1.399 orang dan murid perempuan sebanyak 1.637 orang.

c. Keadaan Gedung dan Ruang Belajar

Gedung dan ruang belajar masing-masing madrasah di kota Watampone telah menempati gedung dan ruang belajar permanen. Fasilitas ruang belajar, sarana dan prasarana sekolah cukup memadai seperti alat bantu mengajar, perpustakaan, mushallah, halaman upacara, halaman bermain, lapangan olahraga, laboratorium dan kantor.

Identitas Responden

a. Responden Guru

Responden guru sebanyak 36 orang yang terdiri atas 9 orang Kepala Madrasah dan 7 orang guru kelas.

1) Pangkat/golongan responden

Karakteristik responden guru berdasarkan pangkat/golongan

Pangkat/Golongan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
II/a – II/d	1	03,71
III/a – III/d	17	62,96
IV/a – IV/e	9	33,33
Jumlah	27	100 %

Sumber: Data Primer 2005

2) Tingkat umur responden

Penyebaran responden guru menurut kelompok umur

Pangkat/Golongan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
< 24 Tahun	-	-
25 – 39 tahun	11	40,74
40 – 54 tahun	11	40,74
> 55 tahun	5	18,52
Jumlah	27	100 %

Sumber: Data Primer 2005

3) Tingkat pendidikan

Penyebaran responden guru menurut tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
PGA/Sederajat	1	3,71
Diploma II	6	22,22
Sarjana Strata I	18	66,66
Sarjana Strata II	2	7,41
Jumlah	27	100 %

Sumber: Data Primer 2005.

b. Responden Masyarakat

Jumlah responden masyarakat hanya diwakili 9 orang dari pengurus Komite masing-masing satu orang.

Selanjutnya, karakteristik responden masyarakat akan diuraikan secara rinci sebagai berikut:

1) Responden masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan

Penyebaran responden masyarakat menurut tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Diploma	1	11,11
Sarjana Muda	1	11,11
Sarjana S.1	6	66,67
Sarjana S.2	1	11,11
Jumlah	27	100 %

Sumber: Data Primer 2005

2) Tingkat pendapatan responden

Penyebaran responden menurut tingkat pendapatan

Tingkat Pendapatan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
> 1 juta	6	66,67
2 - 4 juta	3	33,33
> 5 juta	-	-
Jumlah	9	100 %

Sumber: Data Primer 2005

3) Latar belakang pekerjaan responden masyarakat

Penyebaran responden masyarakat menurut latar belakang pekerjaan

Latar belakang pekerjaan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Pegaw N S	6	66,67
Pensiunan Pegawai	1	11,11

Negeri Wiraswasta	2	22,22
Jumlah	9	100 %

Sumber: Data Primer 2005

Kinerja Kepala Madrasah dalam Pelaksanaan Mbs Pada Madrasah di Kota Watampone

Untuk kinerja kepala madrasah dipakai 6 (enam) komponen penilaian dengan indikator masing-masing, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala Madrasah sebagai Manajer

Tingkat Pelaksanaan	Indikator							
	Kemampuan menyusun program		Kemampuan menyusun organisasi/kepegawaian		Kemampuan menggerakkan staf		Kemampuan mengoptimalkan sumber daya	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Sangat baik	6	66,67	3	33,33	6	66,67	7	77,78
Baik	3	33,33	6	66,67	3	33,33	2	22,22
Kurang baik	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	9	100	9	100	9	100	9	100

Sumber: Data Primer 2005

b. Kepala Madrasah sebagai Administrator

Tingkat pelaksanaan	Indikator											
	Kemampuan mengelola administrasi umum		Kemampuan mengelola administrasi kehumasan		Kemampuan mengelola administrasi ketidakegawaian		Kemampuan mengelola administrasi keuangan		Kemampuan mengelola administrasi sarana/prasarana		Kemampuan mengelola administrasi kesehatan	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Sangat baik	5	55,56	6	66,67	6	66,67	6	66,67	6	66,67	6	66,67
Baik	4	44,44	3	33,33	3	33,33	3	33,33	3	33,33	3	33,33
Kurang baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	9	100	9	100	9	100	9	100	9	100	9	100

Sumber: Data Primer 2005

c. Kepala Madrasah sebagai Supervisor

Tingkat Pelaksanaan	Indikator					
	Kemampuan menyusun program seperti penelitian		Kemampuan melaksanakan supervisi pendidikan		Kemampuan membandingkan hasil supervisi	
	f	%	f	%	f	%
Sangat baik	6	66,67	3	33,33	6	66,67
Baik	3	33,33	6	66,67	3	33,33
Kurang baik	-	-	-	-	-	-
Jumlah	9	100	9	100	9	100

Sumber: Data Primer 2005

d. Kepala Madrasah sebagai Pemimpin

Tingkat pelaksanaan	Indikator									
	Menerahi keprofesionalitas yang baik		Kemampuan memelihara kondisi kesehatan		Memiliki pemahaman tentang visi dan misi madrasah		Kemampuan mengambil keputusan		Kemampuan berkomunikasi	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Sangat baik	6	66,67	5	55,56	5	55,56	7	77,77	6	66,67
Baik	3	33,33	4	44,44	4	44,44	2	22,22	1	11,11
Kurang baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	9	100	9	100	9	100	9	100	9	100

Sumber: Data Primer 2005

e. Kepala Madrasah sebagai Inovator

Tingkat Pelaksanaan	Indikator			
	Kemampuan mencari/merencanakan gagasan baru		Kemampuan melakukan pembaharuan di madrasah	
	f	%	f	%
Sangat baik	6	66,67	3	33,33
Baik	3	33,33	6	66,67
Kurang baik	-	-	-	-
Jumlah	9	100	9	100

Sumber: Data Primer 2005

f. Kepala Madrasah sebagai Motivator

Tingkat Pelaksanaan	Indikator					
	Kemampuan menggerakkan lingkungan kerja fisik		Kemampuan menggerakkan lingkungan kerja non fisik		Kemampuan menetapkan prioritas penghargaan dan hukuman	
	f	%	f	%	f	%
Sangat baik	4	44,44	2	22,22	3	33,33
Baik	5	55,56	7	77,78	6	66,67
Kurang baik	-	-	-	-	-	-
Jumlah	9	100	9	100	9	100

Sumber: Data Primer 2005

Enam unsur cara umum disimpulkan bahwa kinerja kepala madrasah dan manajemen berbasis sekolah pada lokasi sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tingkat pelaksanaan	Indikator						Jumlah	
	Kepala madrasah sebagai manajer	Kepala madrasah sebagai administrator	Kepala madrasah sebagai supervisor	Kepala madrasah sebagai pemimpin	Kepala madrasah sebagai inovator	Kepala madrasah sebagai motivator	f	%
	f	f	f	f	f	f	f	%
Sangat baik	22	35	10	29	12	9	11	57
Baik	14	19	17	16	6	18	7	43
Kurang baik	-	-	-	-	-	-	90	-
Jumlah	36	54	27	45	18	27	207	100

Sumber: Data Primer 2005

Dengan memperhatikan tabel di atas secara umum bahwa variabel kerja kepala madrasah dari keenam unsur tersebut di atas menunjukkan bahwa kinerja kepala madrasah 43 % dinilai baik dan 57 % dinilai sangat baik, dan tidak ada yang memiliki kurang baik, sehingga secara perspektif tetap eksis dan berkembang setara dengan madrasah lain yang sudah berkembang.

Kinerja Guru Dalam Pelaksanaan Mbs Pada Madrasah

Kinerja guru dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah.

Selanjutnya, unsur-unsur dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dinilai dengan indikator masing-masing yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

a. Kelengkapan Program Mengajar Bagi Guru

Tingkat pelaksanaan	Indikator									
	Memiliki dan melaksanakan GBPP		Kesiapan administrasi pengajaran		Kesiapan Satuan Pelajaran (SP)		Kesiapan Buku Keanggotaan Nilai		Kesiapan Buku Perbaikan & Pengayaan	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Sangat tinggi	2	77,78	2	77,78	2	81,43	1	66,67	1	59,26
Tinggi	1	22,22	1	18,52	2	14,82	3	29,63	6	37,04
Rendah	6	-	5	3,70	4	3,70	8	3,70	1	2,70
	-	-	1	-	1	-	1	-	0	-
	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100
	7	-	7	-	7	-	7	-	7	-

Sumber: Data Primer 2005

b. Penyajian Materi

Tingkat pelaksanaan	Indikator									
	Penggunaan Kelas		Pelaksanaan Pre Test dan Post Test		Kesiapan guru dan siswa		Penggunaan metode mengajar		Pelaksanaan alat peraga/dit/buku mengajar	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Sangat tinggi	2	82,48	2	74,08	23	85,18	25	92,59	16	59,26
Tinggi	2	14,82	4	22,22	4	14,82	2	7,41	9	33,33
Rendah	4	3,70	6	3,70	-	-	-	-	2	7,41
	1		1							
	2	100	2	100	27	100	27	100	27	100
	7		7							

Sumber: Data Primer 2005

c. Evaluasi dan Analisis Hasil Belajar Murid

Tingkat pelaksanaan	Indikator									
	Bentuk penilaian tertulis, lisan dan sikap		Objektivitas evaluasi		Keabsahan dan evaluasi		Keragaman dan kontinuitas evaluasi		Akurabilitas Evaluasi	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Sangat tinggi	2	88,89	2	92,58	22	81,48	23	85,18	2	74,08
Tinggi	4	11,11	5	7,42	25	18,52	4	14,82	9	25,92
Rendah	3	-	2	-	-	-	-	-	7	-
	1		1						1	
	2	100	2	100	27	100	27	100	2	100
	7		7						7	

Sumber: Data Primer 2005

d. Program Perbaikan dan Pengayaan

Tingkat pelaksanaan	Indikator									
	Kelengkapan program perbaikan dan pengayaan		Pelaksanaan perbaikan dan pengayaan		Peningkatan pelaksanaan perbaikan dan pengayaan		Jadwal perbaikan dan pengayaan		Akurabilitas hasil perbaikan dan pengayaan kepada orang tua siswa	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Sangat tinggi	2	88,89	2	92,58	1	62,56	1	44,44	26	74,08
Tinggi	4	11,11	5	7,42	7	37,04	2	55,56	7	25,92
Rendah	3	-	2	-	1	-	1	-	-	-
	-		-		0		3		-	
	2	100	2	100	2	100	2	100	27	100
	7		7		7		7		7	

Sumber: Data Primer 2005

Secara umum dapat disimpulkan bahwa faktor pelaksanaan proses belajar mengajar dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dilihat pada lokasi sampel, secara umum keempat unsur tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tingkat pelaksanaan	Indikator							
	Kelempasan program madrasah		Penyajian materi pelajaran		Evaluasi dan analisis hasil belajar		Program perbaikan dan pengayaan	
	f	%	f	%	f	%	f	%
Sangat tinggi	98	72,60	106	79,52	114	84,45	98	72,60
Tinggi	33	24,44	25	18,52	24	17,55	37	27,40
Rendah	4	2,96	4	2,96	-	-	-	-
Jumlah	135	100	135	100	135	100	135	100

Sumber: Data Primer 2005

Dengan demikian secara umum bahwa variabel proses belajar mengajar dalam penelitian ini, yang dinilai dari keempat unsur tersebut di atas menunjukkan rata-rata dinilai sangat tinggi oleh 416 kali atau 77,04 persen, dinilai tinggi oleh 116 kali atau sekitar 21,48 persen sisanya dinilai rendah oleh 8 kali atau sekitar 1,48 persen. Olehnya itu dapat ditegaskan bahwa proses belajar mengajar pada lokasi sampel dinilai berjalan dengan sangat lancar.

Peran Serta Masyarakat Dalam Pelaksanaan Mhs Pada Madrasah Di Kota Watampone

Partisipasi masyarakat dalam madrasah pada penelitian ini akan dilihat dari beberapa unsur seperti: 1) partisipasi masyarakat dalam perencanaan madrasah, 2) peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program, 3) peran serta masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program madrasah, untuk lebih jelasnya ketiga unsur tersebut akan diuraikan secara rinci sebagai berikut:

a. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Program Madrasah

Tingkat pelaksanaan	Indikator									
	Partisipasi dalam perumusan visi, misi, sasaran dan tujuan		Partisipasi dalam pemberian informasi/data		Partisipasi dalam pemberian usul, saran dan pertimbangan		Peran serta masyarakat dalam rapat komite		Partisipasi dalam kebijaksanaan dan pengambilan keputusan	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Sangat tinggi	2	22,22	4	44,44	5	55,56	2	22,22	1	11,11
Tinggi	5	55,56	4	44,44	3	33,33	6	66,67	6	66,67
Rendah	2	-	1	11,11	1	11,11	1	11,11	2	22,22
Jumlah	9	100	9	100	9	100	9	100	9	100

Sumber: Data Primer 2005

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Madrasah

Tingkat pelaksanaan	Indikator				
	Partisipasi dalam perumusan visi, misi	Partisipasi dalam pemberian informasi/data	Partisipasi dalam pemberian usul, saran	Peran serta masyarakat dalam rapat komite	Partisipasi dalam kebijaksanaan dan pengambilan keputusan

	sasaran dan tujuan				dan pertimbangan					
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Sangat tinggi	3	33,33	7	77,78	4	44,44	6	66,67	7	77,78
Tinggi	6	66,67	2	22,22	5	55,56	3	33,33	2	22,22
Rendah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	9	100	9	100	9	100	9	100	9	100

Sumber: Data Primer 2005

c. Partisipasi Masyarakat dalam Monitoring dan Evaluasi

Tingkat pelaksanaan	Indikator									
	Partisipasi dalam perencanaan visi, misi, sasaran dan tujuan		Partisipasi dalam pemberian informasi/data		Partisipasi dalam pemberian usul, saran dan pertimbangan		Peran serta masyarakat dalam rapat komite		Partisipasi dalam kebijaksanaan dan pengambilan keputusan	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
Sangat tinggi	2	22,22	2	22,22	3	33,33	1	11,11	1	11,11
Tinggi	6	66,67	5	55,56	5	55,56	6	66,67	6	66,67
Rendah	1	11,11	2	22,22	1	11,11	2	22,22	2	22,22
Jumlah	9	100	9	100	9	100	9	100	9	100

Sumber: Data Primer 2005

d. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat pelaksanaan	Indikator					
	Peran serta dalam perencanaan Madrasah		Peran serta dalam pelaksanaan madrasah		Peran serta dalam monitoring dan evaluasi	
	f	%	f	%	f	%
Sangat tinggi	14	31,11	27	60	9	20
Tinggi	24	53,33	18	40	28	62,22
Rendah	7	15,56	-	-	8	17,78
Jumlah	45	100	45	100	45	100

Sumber: Data Primer 2005

Dengan memperhatikan tabel tersebut di atas, maka secara umum dapat dilihat bahwa unsur peran serta dalam perencanaan madrasah, pelaksanaan program madrasah, serta monitoring dan evaluasi berada dalam kategori antara tinggi dan sangat tinggi.

Pembahasan

Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dengan orientasi mewujudkan pendidikan yang bermutu tinggi, maka diperlukan sumber daya bermutu tinggi pula. Berdasarkan temuan pada lokasi penelitian bahwa kualitas sumber daya pendidikan dimana kualitas guru dapat dilihat berdasarkan golongan berada pada kategori tinggi yaitu di atas 60 persen golongan tiga dan tingkat pendidikan mayoritas guru sudah berada pada jenjang pendidikan strata satu sementara upaya guru dan pihak pemerintah terhadap peningkatan kualitas guru masih terus dilaksanakan. Kedua faktor

tersebut yaitu tingkat pendidikan dan golongan signifikan dengan kematangan/pengalaman bagi profesi sebagai guru.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah unsur masyarakat dipandang sebagai unsur yang penting mendukung keberhasilan madrasah (*stakeholder*).

Menurut pengamatan peneliti bahwa tingkat pendidikan masyarakat signifikan dengan tingkat partisipasi mereka, hal ini menunjukkan bahwa gagasan-gagasan pemikiran dalam rangka pengembangan madrasah terdapat kecenderungan diwarnai oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Sedang tingkat pendapatan masyarakat yang berbeda tidak menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang menonjol, baik kehadiran pada pertemuan rutin maupun gagasan dan pemikiran terhadap pengembangan madrasah, menyangkut hal berkaitan dengan sumbangan material secara umum juga tidak menunjukkan perbedaan yang menonjol.

Dan faktor latar belakang pekerjaan berkaitan dengan waktu dan kesempatan yang berbeda-beda signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat berperan aktif dalam Komite Madrasah, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga jenis pekerjaan yang dianalisis, ternyata keterlibatan pegawai negeri sipil dan profesi wiraswasta menduduki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding pensiunan pegawai.

Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ketiga unsur disebutkan sebelumnya yaitu *pertama*, optimalisasi kinerja kepala sekolah memanej sumber daya yang ada memegang peranan penting terhadap keberhasilan madrasah, *kedua* kinerja guru dalam proses belajar mengajar yang berhubungan langsung dengan peserta didik sebagai sasaran pendidikan dan *ketiga* sumber daya masyarakat yang berhubungan dengan unsur pendukung (*stakeholder*) dalam upaya pengembangan madrasah. Untuk lebih jelasnya ketiga unsur tersebut akan dibahas secara rinci sebagai berikut:

a. Kinerja Kepala Sekolah

Kepala madrasah sebagai pemimpin memegang tugas pelemabagan dan pencapaian tujuan organisasi madrasah. Inisiatif kepala madrasah dalam menyesuaikan sumber daya madrasah pengorganisasian aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran-sasaran dilakukan melalui suatu tim kerja. Sedang kepala madrasah sebagai sebagai motivator, cenderung harus lebih profesional terhadap berbagai tugas-tugas di luar jam kerja guru secara finansial, sebab bagaimanapun orang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi selalu melihat hubungan antara usaha/kegiatan dengan hasil yang diperoleh.

h. Kinerja Guru dalam Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar

Pelaksanaan proses belajar mengajar berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur seperti kelengkapan program mengajar, penyajian materi, evaluasi, analisis, perbaikan dan pengayaan berada dalam kategori tinggi dan sangat tinggi.

Tingginya penilaian responden terhadap proses belajar mengajar berdasarkan hasil penelitian pada madrasah di Kota Watampone, yang selanjutnya akan dibahas pada bahagian berikut:

c. Kelengkapan Program Pengajaran

Program pengajaran bagi guru dalam menggunakan GBPP secara berkesinambungan mulai pada tahap penyusunan sampai pada tahap pelaksanaan pengajaran di kelas sehingga murid sebagai sasaran pengajaran menerima materi secara sistematis. Demikian pula kelengkapan administrasi guru mengajar di kelas.

d. Penyajian Materi Pelajaran

Dalam strategi belajar dan pembelajaran guru mampu memahami dan mengelola kelas dalam pengertian bahwa penyajian materi pelajaran tidak kaku tetapi fleksibel (*improvisasi*) sehingga respon peserta didik berkesan menyenangkan menerima materi pelajaran. Guru diperkaya dengan penggunaan berbagai metode seperti, diskusi, tanya jawab, ceramah, demonstrasi dan strategi pembelajaran untuk *active learning* yang sesuai disertai alat peraga/alat bantu dan sebagainya, digunakan secara terpadu dan harmonis dalam penyajian mata pelajaran.

e. Unsur Evaluasi dan Analisis Hasil Belajar Siswa

Kegiatan evaluasi dilakukan secara berkala, teratur serta pembukuan hasilnya sampai pada tahap pelaporan hasil evaluasi murid setiap semester yang akan digunakan baik untuk kebutuhan internal madrasah sekaligus sebagai bahan laporan pendidikan.

f. Program Perbaikan dan Pengayaan

Berdasarkan temuan penelitian bahwa program perbaikan dan pengayaan berada dalam kategori tinggi dan sangat tinggi, karena rancangan program pendidikan dan pengayaan dimiliki oleh setiap guru sehingga pada tingkat pelaksanaannya guru dapat melaksanakannya secara tuntas.

g. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang dilembagakan dalam bentuk komite madrasah untuk menjamin akan adanya akuntabilitas, transparansi terhadap proses pelaksanaan pendidikan. Olehnya itu, masyarakat sebagai *stakeholder* sekolah dituntut keterlibatannya mulai tahap perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring sampai pada tingkat evaluasi hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian keempat unsur tersebut, yaitu peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program madrasah dalam monitoring dan evaluasi berada dalam kategori tinggi.

Dikemukakan oleh sebagian besar responden sebagai anggota dalam organisasi komite madrasah, bahwa masyarakat memang mempunyai tingkat partisipasi yang tinggi secara material terhadap pembangunan madrasah dan sangat jarang masyarakat mempersoalkan bagaimana alokasi dana tersebut disalurkan secara mendetail karena masyarakat percaya kepada komitennya yang terkadang komite tidak sempat membuat penguraian secara rinci sebagai bahan evaluasi secara organisasi dari komite madrasah, walaupun laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan tetap ada dari pihak pengelola madrasah tetapi tidak pernah mendapat tanggapan yang serius (negatif) baik dari komite sekolah maupun anggota masyarakat yang hadir setiap pertemuan.

PENUTUP

Kesimpulan

- a. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dilihat dari kinerja kepada madrasah terhadap berbagai tugas dan fungsi kepala madrasah seperti; Kepala Madrasah sebagai manajer, administrator, supervisor, pemimpin, inovator dan motivator berjalan baik.
- b. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah telah dimanfaatkan secara optimal oleh para guru. Dinilai dari empat aspek yakni kelengkapan program manajer guru, penyajian materi pelajaran, evaluasi dan analisis hasil belajar murid serta program perbaikan dan pengayaan, belajar dengan lancar.
- c. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah unsur masyarakat dan pihak pengelola madrasah sepemahannya menunjukkan kerjasama yang baik diakibatkan oleh tingginya kemampuan akademik masyarakat berorganisasi (komite madrasah) sehingga sangat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik seperti, perumusan misi, visi dalam perencanaan dan mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan madrasah.

Saran

- a. Pihak pengelola madrasah perlu melakukan transformasi akademik secara intens dengan masyarakat secara kelembagaan melalui organisasi komite madrasah sehingga pemahaman masyarakat terhadap tanggung jawab keberhasilan madrasah dapat berjalan maksimal.

- b. Mengikuti perkembangan tuntutan pendidikan maka pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang lebih mengedepankan kemandirian pengelolaan madrasah, maka pengembangan tugas dan tanggung jawab guru menjadi suatu kebutuhan mendesak dengan terus memberikan pendidikan dan latihan atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka pengembangan profesionalisme guru.
- c. Lebih memberikan peluang lebih nyata kepada wakil masyarakat dalam komite madrasah untuk lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis maupun secara konseptual sehingga pelaksanaan manajemen berbasis sekolah mencerminkan demokratisasi di bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. Muh. *Bone Selayang Pandang*. Bone: Pomda Tk. II. Kab. Bone, 1969
- Amidjadja, Tisna, D.A. *Pola Pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan di Indonesia dan Pedoman Pelaksanaannya*. Jakarta: Depdikbud, 1981
- Bastian, Resa Aulia. *Reformasi Pendidikan*. Yogyakarta: Luttera Pustaka Utama, 2002
- BPPN dan Bank Dunia. *School Based Manajemen*. Jakarta: BPPN dan Bank Dunia, 1999
- Burhanuddin. *Desentralisasi Manajemen Pendidikan*. Malang: UNM, 1998
- Depdiknas. *Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Depdiknas, 2001
- Fiske, Edward. B. *Desentralisasi Pengajaran*. (Terjemahan: alih bahasa: Basilius Bengotoku). Jakarta: Grasindo, 1998
- Mantja, W. dan Ali Imron. *Manajemen Peserta Didik*. Malang: Depdikbud.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi dan Implementasi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Nanang, Fattah. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Sidi Indra, Djati. *Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan*. Bandung: PPS UPI, 2000
- Suparno, Paul, SJ. *Reformasi Pendidikan (Sebuah Rekomendasi)*. Yogyakarta: Kanisius, 2002
- Thoha, Miftah. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali, 1995
- Tilau, H.A.R. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Undang-undang No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang No. 22 Tahun 1999. Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zamroni. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigrif Publishing, 2000